



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 166);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG  
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA	Rp. 1.215.389.825.074,52	
b. Belanja	Rp. 1.210.975.533.778,51	
Surplus-LRA		Rp. 4.414.291.296,01
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 49.217.253.572,06	
- Pengeluaran	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 45.717.253.572,06

## Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diurai sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp. 30.007.852.557,48 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.245.397.677.632,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 1.215.389.825.074,52</u>	
Selisih		<u>Rp. 30.007.852.557,48</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. 80.139.397.425,49 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.291.114.931.204,00	
2. Realisasi	Rp. 1.210.975.533.778,51	
Selisih		<u>Rp. 80.139.397.425,49</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit)-LRA sebesar Rp. (50.131.544.868,01) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (45.717.253.572,00)	
2. Realisasi Surplus	<u>Rp. 4.414.291.296,01</u>	
Selisih		<u>Rp. (50.131.544.868,01)</u>
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. (0,06) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 49.217.253.572,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 49.217.253.572,06</u>	
Selisih		<u>Rp. (0,06)</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah pembiayaan	Rp. 3.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>
Selisih	<u>Rp. 0,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sebesar Rp (0,06) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 45.717.253.572,00
2. Realisasi	<u>Rp. 45.717.253.572,06</u>
Selisih	<u>(0,06)</u>

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 49.217.253.572,06
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	<u>Rp. 49.217.253.572,06</u>
c. Saldo	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>Rp. 50.131.544.868,07</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp. 50.131.544.868,07</u>

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 2.223.677.924.249,95
b. Jumlah kewajiban	Rp. 13.134.051.159,09
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.210.543.873.090,86

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp. 1.172.524.120.617,40
b. Beban	Rp. 1.111.327.019.057,46
c. Surplus kegiatan operasional	Rp. 61.197.101.559,94
d. (Defisit) dari kegiatan non operasional	Rp. (13.074.529.208,10)



e. Pos luar biasa	Rp. (1.991.391.035,00)
f. Surplus Laporan Operasional	Rp. 46.131.181.316,84

---

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp. 49.285.486.005,61
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 154.936.404.873,01
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (154.022.113.577,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 112.499.517,54
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp. 50.312.276.819,16

---

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.156.573.141.029,89
b. Surplus Laporan Operasional	Rp. 46.131.181.316,84
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 7.839.550.744,13
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.210.543.873.090,86

---

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi TA 2022;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan TA 2022;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan TA 2022;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 AGUSTUS 2023

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 178  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05/1415/PRS/2023

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**NOMOR TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**(AUDITED)**

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	D	49.217.253.572,06	60.472.140.076,80
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		49.217.253.572,06	60.472.131.308,21
3	<b>Subtotal (1 - 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.768,59</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		50.131.544.868,07	49.217.253.572,06
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>50.131.544.868,07</b>	<b>49.217.262.340,65</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			(8.768,59)
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Lain - lain)		0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>D</b>	<b>50.131.544.868,07</b>	<b>49.217.253.572,06</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**NOMOR TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**(AUDITED)**

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	D	49.217.253.572,06	60.472.140.076,80
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		49.217.253.572,06	60.472.131.308,21
3	<b>Subtotal (1 - 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.768,59</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		50.131.544.868,07	49.217.253.572,06
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>50.131.544.868,07</b>	<b>49.217.262.340,65</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			(8.768,59)
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Lain - lain)		0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>D</b>	<b>50.131.544.868,07</b>	<b>49.217.253.572,06</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	C.1	2.156.573.141.029,89	2.073.918.032.660,71
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	C.2	46.131.181.316,84	83.161.728.863,13
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR:	C.3	7.839.550.744,13	(506.620.493,94)
	Koreksi Nilai Persediaan		172.701,00	0,00
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		2.228.771.000,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya		5.610.607.043,13	(506.620.493,94)
4	EKUITAS AKHIR	C.4	2.210.543.873.090,86	2.156.573.141.029,89

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
7 01 7.01.0.00.0.00.35 5.1 02	Belanja Barang dan Jasa	575.860.000,00	553.630.800,00	(22.229.200,00)	96,14
7 01 7.01.0.00.0.00.35 5.2	Belanja Modal	45.000.000,00	42.882.000,00	(2.118.000,00)	95,29
7 01 7.01.0.00.0.00.35 5.2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	42.882.000,00	(2.118.000,00)	95,29
7 01 7.01.0.00.0.00.36	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	1.787.532.053,00	1.617.445.172,00	(170.086.881,00)	90,48
7 01 7.01.0.00.0.00.36 5.1	Belanja Operasi	1.750.017.053,00	1.591.415.172,00	(158.601.881,00)	90,94
7 01 7.01.0.00.0.00.36 5.1 01	Belanja Pegawai	1.169.122.601,00	1.056.123.952,00	(112.998.649,00)	90,33
7 01 7.01.0.00.0.00.36 5.1 02	Belanja Barang dan Jasa	580.894.452,00	535.291.220,00	(45.603.232,00)	92,15
7 01 7.01.0.00.0.00.36 5.2	Belanja Modal	37.515.000,00	26.030.000,00	(11.485.000,00)	69,39
7 01 7.01.0.00.0.00.36 5.2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.515.000,00	26.030.000,00	(11.485.000,00)	69,39
7 01 7.01.0.00.0.00.37	KECAMATAN AMBARAWA	1.694.857.594,00	1.628.214.387,00	(66.643.207,00)	96,07
7 01 7.01.0.00.0.00.37 5.1	Belanja Operasi	1.639.140.730,00	1.572.955.387,00	(66.185.343,00)	95,96
7 01 7.01.0.00.0.00.37 5.1 01	Belanja Pegawai	1.074.769.590,00	1.042.953.683,00	(31.815.907,00)	97,04
7 01 7.01.0.00.0.00.37 5.1 02	Belanja Barang dan Jasa	564.371.140,00	530.001.704,00	(34.369.436,00)	93,91
7 01 7.01.0.00.0.00.37 5.2	Belanja Modal	55.716.864,00	55.259.000,00	(457.864,00)	99,18
7 01 7.01.0.00.0.00.37 5.2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.716.864,00	55.259.000,00	(457.864,00)	99,18
7 01 7.01.0.00.0.00.38	KECAMATAN PARDASUKA	2.203.440.018,00	2.048.939.470,00	(154.500.548,00)	92,99
7 01 7.01.0.00.0.00.38 5.1	Belanja Operasi	2.137.422.518,00	1.989.159.470,00	(148.263.048,00)	93,06
7 01 7.01.0.00.0.00.38 5.1 01	Belanja Pegawai	1.493.846.310,00	1.454.940.289,00	(38.906.021,00)	97,40
7 01 7.01.0.00.0.00.38 5.1 02	Belanja Barang dan Jasa	643.576.208,00	534.219.181,00	(109.357.027,00)	83,01
7 01 7.01.0.00.0.00.38 5.2	Belanja Modal	66.017.500,00	59.780.000,00	(6.237.500,00)	90,55
7 01 7.01.0.00.0.00.38 5.2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.017.500,00	59.780.000,00	(6.237.500,00)	90,55
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.656.866.502,00</b>	<b>7.400.588.150,00</b>	<b>(256.278.352,00)</b>	<b>96,65</b>
<b>8 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>7.656.866.502,00</b>	<b>7.400.588.150,00</b>	<b>(256.278.352,00)</b>	<b>96,65</b>
8 01 8.01.0.00.0.00.29	Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.656.866.502,00	7.400.588.150,00	(256.278.352,00)	96,65
8 01 8.01.0.00.0.00.29 5.1	Belanja Operasi	7.612.196.502,00	7.368.697.150,00	(243.499.352,00)	96,80
8 01 8.01.0.00.0.00.29 5.1 01	Belanja Pegawai	2.270.474.547,00	2.214.776.666,00	(55.697.881,00)	97,55
8 01 8.01.0.00.0.00.29 5.1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.427.555,00	1.978.844.895,00	(27.582.660,00)	98,63
8 01 8.01.0.00.0.00.29 5.1 05	Belanja Hibah	3.335.294.400,00	3.175.075.589,00	(160.218.811,00)	95,20
8 01 8.01.0.00.0.00.29 5.2	Belanja Modal	44.670.000,00	31.891.000,00	(12.779.000,00)	71,39
8 01 8.01.0.00.0.00.29 5.2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.670.000,00	31.891.000,00	(12.779.000,00)	71,39
<b>(SURPLUS/DEFISIT)</b>		<b>(45.717.253.672,00)</b>	<b>4.414.291.298,01</b>	<b>50.131.544.868,01</b>	<b>(9,66)</b>

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
Belanja Bantuan Sosial	4.822.800.000,00	4.666.200.000,00	96,75	1.425.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>160.325.411.182,00</b>	<b>151.191.253.835,00</b>	<b>94,30</b>	<b>218.624.209.523,80</b>
Belanja Modal Tanah	267.625.000,00	247.841.445,00	92,61	3.543.002.050,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.630.858,00	41.103.637.390,00	93,42	84.749.395.820,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.371.444.370,00	28.183.569.128,00	95,96	37.368.839.493,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.089.752.315,00	77.022.060.318,00	92,70	87.795.669.360,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.595.958.639,00	4.634.145.554,00	128,87	5.167.302.800,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.250.000.000,00</b>	<b>1.991.391.035,00</b>	<b>37,93</b>	<b>3.193.294.200,00</b>
Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000,00	1.991.391.035,00	37,93	3.193.294.200,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>188.236.957.080,00</b>	<b>186.833.580.515,00</b>	<b>99,25</b>	<b>192.350.378.688,00</b>
Belanja Bagi Hasil	4.850.935.780,00	4.092.908.601,00	84,37	3.500.632.849,00
Belanja Bantuan Keuangan	183.386.021.300,00	182.740.671.914,00	99,65	188.849.745.839,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.291.114.931.204,00</b>	<b>1.210.975.533.778,51</b>	<b>93,79</b>	<b>1.266.958.117.285,18</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(45.717.253.572,00)</b>	<b>4.414.291.296,01</b>	<b>(9,66)</b>	<b>(9.254.877.736,16)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>49.217.253.572,00</b>	<b>49.217.253.572,06</b>	<b>100,00</b>	<b>60.472.131.308,21</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.217.253.572,00	49.217.253.572,06	100,00	60.472.131.308,21
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>49.217.253.572,00</b>	<b>49.217.253.572,06</b>	<b>100,00</b>	<b>60.472.131.308,21</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>45.717.253.572,00</b>	<b>45.717.253.572,06</b>	<b>100,00</b>	<b>58.472.131.308,21</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	50.131.544.868,07	0,00	49.217.253.572,05

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH



Kode Rekening							Uraian	JUMLAH (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Dasar Hukum
								ANGGARAN	REALISASI	Rp	%	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	04	2.01	01		<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	196.695.000,00	191.500.000,00	(5.195.000,00)	97,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	04	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	196.695.000,00	191.500.000,00	(5.195.000,00)	97,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	04	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.695.000,00	191.500.000,00	(5.195.000,00)	97,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.378.500,00	9.734.586,00	(15.643.914,00)	38,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	05	2.01	00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.378.500,00	9.734.586,00	(15.643.914,00)	38,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	05	2.01	04		<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	25.378.500,00	9.734.586,00	(15.643.914,00)	38,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	05	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	25.378.500,00	9.734.586,00	(15.643.914,00)	38,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	05	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.378.500,00	9.734.586,00	(15.643.914,00)	38,36	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	06	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.300.000,00	7.900.000,00	(2.400.000,00)	76,70	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	06	2.01	00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.300.000,00	7.900.000,00	(2.400.000,00)	76,70	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	06	2.01	03		<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	10.300.000,00	7.900.000,00	(2.400.000,00)	76,70	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	06	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	10.300.000,00	7.900.000,00	(2.400.000,00)	76,70	
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	06	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	7.900.000,00	(2.400.000,00)	76,70	
Jumlah Belanja								2.203.440.018,00	2.048.939.470,00	(154.500.548,00)	92,99	
Total Surplus/(Defisit)								(2.203.440.018,00)	(2.048.939.470,00)	154.500.548,00	92,99	
0	00	7.01.0.00.0.00.38.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								-	-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								-	-	-	-	

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Belanja											
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tak Terduga		Belanja Transfer					
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi				
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	01 2.09 09												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	01 2.09 10												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	02												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	02 2.01												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	02 2.01 01												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	02 2.01 04												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	03												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	03 2.01												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	03 2.01 03												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	04												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	04 2.01												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	04 2.01 03												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	05												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	05 2.01												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	05 2.01 03												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	06												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	06 2.01												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	06 2.01 03												
8 01 8.01.0.00.0.00.29.00	06 2.01 04												
		<b>TOTAL</b>											

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

NO	URAIAN	Ref	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
36	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Subsidi	2.3	194.025.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban Hibah	2.4	22.748.435.181,00	22.107.469.779,12	640.965.401,88	2,90
39	Beban Bantuan Sosial	2.5	4.666.200.000,00	1.425.000.000,00	3.241.200.000,00	227,45
40	Beban Penyisihan Piutang	2.6	993.253.227,10	95.927.639,98	897.325.587,12	935,42
41	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.7	184.264.340.207,76	150.387.146.961,73	33.877.193.246,03	22,53
42	<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>1.047.126.779.542,46</b>	<b>997.368.725.334,37</b>	<b>49.758.054.208,09</b>	<b>4,99</b>
43						
44	<b>BEBAN TRANSFER</b>					
45	Beban Bagi Hasil	2.8	4.092.908.601,00	3.500.632.849,00	592.275.752,00	16,92
46	Beban Bantuan Keuangan	2.9	60.107.330.914,00	60.751.951.239,00	(644.620.325,00)	(1,06)
47	<b>Jumlah Beban Transfer</b>		<b>64.200.239.515,00</b>	<b>64.252.584.088,00</b>	<b>(52.344.573,00)</b>	<b>(0,08)</b>
48	<b>JUMLAH BEBAN (42 + 47)</b>		<b>1.111.327.019.057,46</b>	<b>1.061.621.309.422,37</b>	<b>49.705.709.635,09</b>	<b>4,68</b>
49	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>3</b>	<b>61.197.101.559,94</b>	<b>97.630.558.928,15</b>	<b>(36.433.457.368,21)</b>	<b>(37,32)</b>
50						
51	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>4</b>				
52	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00		0,00	0,00
55	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
56	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57						
58	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
59	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO		11.746.353.438,90	11.291.535.865,02	454.817.573,88	4,03
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.328.175.769,20	0,00	1.328.175.769,20	0,00
62	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>		<b>13.074.529.208,10</b>	<b>11.291.535.865,02</b>	<b>1.782.993.343,08</b>	<b>15,79</b>
63	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(13.074.529.208,10)</b>	<b>(11.291.535.865,02)</b>	<b>(1.782.993.343,08)</b>	<b>15,79</b>
64						
65	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>48.122.572.351,84</b>	<b>86.339.023.063,13</b>	<b>(38.216.450.711,29)</b>	<b>(44,26)</b>
66						
67	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5</b>				
68	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
69	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71						
72	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>					
73	Beban Tidak Terduga		1.991.391.035,00	3.177.294.200,00	(1.185.903.165,00)	(37,32)
74	<b>Jumlah Beban Luar Biasa</b>		<b>1.991.391.035,00</b>	<b>3.177.294.200,00</b>	<b>(1.185.903.165,00)</b>	<b>(37,32)</b>
75	<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>(1.991.391.035,00)</b>	<b>(3.177.294.200,00)</b>	<b>1.185.903.165,00</b>	<b>(37,32)</b>
76						
77	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>6</b>	<b>46.131.181.316,84</b>	<b>83.161.728.863,13</b>	<b>(37.030.547.546,29)</b>	<b>(44,53)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan.

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
45	<b>ASET LAINNYA</b>	1.4		
46	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.4	25.817.786,00	89.899.786,00
47	Aset Tidak Berwujud	1.4	545.435.992,00	123.970.000,00
48	Aset Lain-Lain	1.4	86.694.893.197,52	3.007.234.242,00
49	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.4	(73.909.508.855,72)	0,00
50	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.4	2.491.089.130,00	0,00
51	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>15.847.727.249,80</b>	<b>3.221.104.028,00</b>
52	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.223.677.924.249,95</b>	<b>2.168.403.950.576,75</b>
53	<b>KEWAJIBAN</b>	2		
54	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	2.1		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.1.1	160.269.351,09	67.231.433,55
56	Utang Bunga		0,00	0,00
57	Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
59	Utang Belanja	2.1.2	12.973.781.808,00	3.675.824.096,96
60	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	8.087.754.016,35
61	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>13.134.051.159,09</b>	<b>11.830.809.546,86</b>
62	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
63	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
65	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
66	Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
67	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>13.134.051.159,09</b>	<b>11.830.809.546,86</b>
69	<b>EKUITAS</b>	3		
70	<b>EKUITAS</b>	3	2.210.543.873.090,86	2.156.573.141.029,89
71	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.210.543.873.090,86</b>	<b>2.156.573.141.029,89</b>
72	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.223.677.924.249,95</b>	<b>2.168.403.950.576,75</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

NO	URAIAN	REF	2022	2021
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
87	Pembayaran Utang Jangka Pendek		-	-
88	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (76 s.d 87)</b>		-	-
89	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (74-88)</b>		-	-
90	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>4</b>		
91	<b>Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>4.1</b>		
92	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		57.965.694.696,09	70.202.767.445,55
93	Penerimaan kas lainnya di Bendahara Pengeluaran		20.462.600,00	1.001.000,00
94	Saldo UP Tahun 2021		-	-
95	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (92 s.d 94)</b>		<b>57.986.157.296,09</b>	<b>70.203.768.445,55</b>
96	<b>Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>4.2</b>		
97	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		57.872.656.778,55	71.018.160.310,83
98	Pengeluaran kas lainnya di Bendahara Pengeluaran		1.001.000,00	2.870.000,00
99	Koreksi SILPA		-	8.768,59
100	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (97 s.d 99)</b>		<b>57.873.657.778,55</b>	<b>71.021.039.079,42</b>
101	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (95-100)</b>		<b>112.499.517,54</b>	<b>(817.270.633,87)</b>
102	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (34+60+89+101)</b>	<b>5</b>	<b>1.026.790.813,55</b>	<b>(12.072.148.370,03)</b>
103	Saldo Awal Kas BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, JKN		49.285.486.005,61	61.357.634.357,63
104	Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, JKN & BOS terdiri dari : (102 + 103)		50.312.276.819,16	49.285.486.005,61
105	Kas di Bank Lampung		45.727.310.055,59	45.014.502.434,64
106	Piutang PFK		-	-
107	Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan		-	-
108	Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	-
109	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		4.420.176.912,84	4.026.532.290,21
110	Kas di Bendahara BOS		164.789.850,73	244.451.280,76
111	Setara Kas		-	-

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  
KABUPATEN PRINGSEWU 2022

**VII PENUTUP**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya kemudian dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ini kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh rakyat/masyarakat Kabupaten Pringsewu

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	15.458.989.656,83	20.772.212.809,00	16.525.239.370,20	19.705.963.095,63
2	BPKAD	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	604.164,88	-	604.164,88
		Piutang Transfer Antar Daerah	30.692.129.468,00	38.996.907.124,00	30.692.129.468,00	38.996.907.124,00
3	Dinkes	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.536.384.296,00	351.691.585,00	13.536.384.296,00	351.691.585,00
4	PU	Piutang Retribusi Daerah	27.608.628,00	5.632.140,00	3.719.998,00	29.520.770,00
5	PTSP	Piutang Retribusi Daerah	10.241.112,00	3.719.998,00	-	13.961.110,00
6	Pagelaran Utara	Piutang Retribusi Daerah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
7	Koperasi	Piutang Retribusi Daerah	-	8.645.000,00	-	8.645.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>59.725.353.160,83</b>	<b>60.141.412.820,88</b>	<b>60.757.473.132,20</b>	<b>59.109.292.849,51</b>

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN  
PIUTANG TIDAK TERTAGIH  
TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak Daerah	19.705.963.095,63	5.866.341.890,52	13.839.621.205,11
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	352.295.749,88	-	352.295.749,88
3	Piutang Retribusi Daerah	54.126.880,00	37.849.740,00	16.277.140,00
4	Piutang Transfer Antar Daerah	38.996.907.124,00	-	38.996.907.124,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.109.292.849,51</b>	<b>5.904.191.630,52</b>	<b>53.205.101.218,99</b>

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH



LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR  
 DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam rupiah)

No.	OPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2		-	-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
		-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar bukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2012	PT. BANK LAMPUNG	Perda	Saham	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	2.500.000.000,00	14.000.000.000,00	-	-	-	14.000.000.000,00
2.	2012	PDAM WAY SEKAMPUNG		Saham	7.239.741.431,00	7.239.741.431,00	1.000.000.000,00	8.239.741.431,00	-	(473.394.577,00)	-	7.766.346.854,00
6.												
Dst												
<b>Jumlah</b>												21.766.346.854,00

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN  
 ASET TETAP DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>A</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>3.086.991.890.319,59</b>	<b>301.995.372.289,57</b>	<b>174.388.682.382,52</b>	<b>3.214.598.580.226,64</b>
1	Tanah	525.499.481.489,99	2.911.205.861,00	5.810.601.790,00	522.600.085.560,99
2	Peralatan dan Mesin	377.487.380.397,01	86.636.937.498,10	118.619.521.836,42	345.504.796.058,69
3	Gedung dan Bangunan	776.820.408.588,32	81.830.991.911,47	28.274.363.208,00	830.377.037.291,79
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.344.884.391.986,72	126.157.875.557,00	8.509.253.683,30	1.462.533.013.860,42
5	Aset Tetap Lainnya	60.955.243.932,55	4.223.229.562,00	13.174.941.864,80	52.003.531.629,75
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.344.983.925,00	235.131.900,00	-	1.580.115.825,00
<b>B</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>123.970.000,00</b>	<b>90.271.679.067,52</b>	<b>3.155.319.878,00</b>	<b>87.240.329.189,52</b>
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	123.970.000,00	421.465.992,00	-	545.435.992,00
3	Aset Lain-lain	-	89.850.213.075,52	3.155.319.878,00	86.694.893.197,52

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
<b>A</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>3.086.991.890.319,59</b>	<b>301.995.372.289,57</b>	<b>174.388.682.382,52</b>	<b>3.214.598.580.226,64</b>
1	Tanah	525.499.481.489,99	2.911.205.861,00	5.810.601.790,00	522.600.085.560,99
2	Peralatan dan Mesin	377.487.380.397,01	86.636.937.498,10	118.619.521.836,42	345.504.796.058,69
3	Gedung dan Bangunan	776.820.408.588,32	81.830.991.911,47	28.274.363.208,00	830.377.037.291,79
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.344.884.391.986,72	126.157.875.557,00	8.509.253.683,30	1.462.533.013.860,42
5	Aset Tetap Lainnya	60.955.243.932,55	4.223.229.562,00	13.174.941.864,80	52.003.531.629,75
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.344.983.925,00	235.131.900,00	-	1.580.115.825,00

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**PER 31 DESEMBER 2022**

*(dalam rupiah)*

No.	OPD	Saldo awal	Reklasifikasi								Penghapusan	Saldo Per 31 Desember 2022
			Berkurang				Bertambah					
			Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.344.983.925,00	-	-	-	-	-	235.131.900,00	-	-	-	1.580.115.825,00

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

No.	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
19	BPBD		130.996.250,00	128.521.250,00	2.475.000,00
20	DPMP		409.476.000,00	409.476.000,00	-
21	DISNAKER		35.304.000,00	35.304.000,00	-
22	DINAS CAPIL		214.625.500,00	214.274.500,00	351.000,00
23	DINAS P3AP2KB		476.751.000,00	476.751.000,00	-
24	DINAS PERTANIAN		400.184.695,00	400.184.695,00	-
25	DINAS KETAHANAN PANGAN		58.973.000,00	58.973.000,00	-
26	DINAS PERIKANAN		2.994.795.750,00	2.967.283.500,00	27.512.250,00
27	DINAS KOPERASI PERINDAG		575.476.850,00	537.909.850,00	37.567.000,00
28	DMPTSP		390.520.200,00	390.520.200,00	-
29	BPKAD	89.899.786,00	3.298.770.130,00	871.763.000,00	2.516.906.916,00
30	BADAN PENDAPATAN	123.970.000,00	1.171.412.480,00	1.153.912.480,00	141.470.000,00
31	INSPEKTORAT		50.190.640,00	50.190.640,00	-
32	BAPPEDA		451.899.800,00	447.339.800,00	4.560.000,00
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		6.156.902.670,00	6.152.047.670,00	4.855.000,00
34	BADAN KESBANGPOL		227.162.000,00	227.162.000,00	-
35	BADAN POL PP		259.282.000,00	259.282.000,00	-
36	BKPSDM		991.209.000,00	991.209.000,00	-
37	DINAS KOMINFO		1.568.665.300,00	1.568.665.300,00	-
38	DINAS PERPUSDA		58.466.498,00	57.867.714,00	598.784,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.221.104.028,00</b>	<b>86.536.132.077,52</b>	<b>73.909.508.855,00</b>	<b>15.847.727.250,52</b>

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
 PER 31 DESEMBER 2022

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke kas daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.								
3.								
4.								
Dst								
<b>Jumlah</b>								

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
 PER 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.231.433,55	160.269.351,09	67.231.433,55	160.269.351,09
2	Utang Belanja	11.763.578.113,31	4.135.181.665,00	2.924.977.970,31	12.973.781.808,00
Jumlah		11.830.809.546,86	4.295.451.016,09	2.992.209.403,86	13.134.051.159,09

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH





LAMPIRAN XX.2  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No.	BUMD	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba(Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Air Minum								
	1. PDAM Way Sekampung	Laporan Keuangan PDAM Way Sekampung Tahun 2022	Audited	1.448.488.064,00	1.915.507.165,00	(467.019.101,00)	35.354.345,00	-	(431.664.756,00)
	Sub Total			1.448.488.064,00	1.915.507.165,00	(467.019.101,00)	35.354.345,00	-	(431.664.756,00)
	Total Seluruh Bidang Industri			1.448.488.064,00	1.915.507.165,00	(467.019.101,00)	35.354.345,00	-	(431.664.756,00)

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH